

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN (STUDI DI
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

HIJRAH TUL AMAL

NIM : 11527100025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an (Studi Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)*, yang ditulis oleh:

Nama : Hijrah Tul Amal


Nim : 11527100025

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Muharram 1441 H
23 September 2019 M

Pembimbing Skripsi


MUSLIM, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “**Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an (Studi Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**” yang ditulis oleh :

Nama : HIJRAH TUL AMAL
NIM : 11527100025
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH.

Penguji 1
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Penguji 2
Dr. H. Abu Samah, MH.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an (Studi Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)”**. Dalam proses pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh DPRD bersama Kepala Daerah harus memperhatikan salah satu aspek yaitu aspek keterbukaan, bahwa setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi atau praktisi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sangatlah banyak yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang berbeda. Peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya, oleh karena itu dalam pembuatan Perda harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang, serta Apa saja faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an dan dampaknya terhadap tingkat pengetahuan masyarakat. Adapun dalam tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an, Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar belum berjalan dengan maksimal, itu dibuktikan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya Perda Pandai Membaca Al-Qur’an. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Kementrian Agama Kabupaten Kampar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini adalah Partisipasi Masyarakat, Dana/Biaya dan Sarana Prasarana dalam mensosialisasikan Perda ini. Oleh karena itu, sampai saat sekarang ini Perda tentang Pandai Membaca Al-Qur’an tidak dijalankan sesuai Perda tersebut dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza Wajalla, shalawat seiring salam seroga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia dan istiqomah berada di atas ajarannya hingga hari kiamat.

Maksud diadakannya penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Husin dan Ibunda Nurmala yang telah banyak berperan dalam penyelesaian studi ini. Terimakasih banyak Ananda ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda atas semua dukungan, dorongan, motivasi, nasehat, perhatian, kasih sayang, cinta dan do'a yang sangat tulus dan tak pernah putus, serta materil yang tak terkira nilainya untuk Ananda yang tidak bisa Ananda balas dengan apapun. Tanpa Ayahanda dan Ibunda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhinta, Ananda tidak bisa seperti ini. Tanpa dukungan dan nasehat serta do'a Ayahanda dan Ibunda, Ananda takkan sekuat ini, takkan sesabar ini dan takkan bisa melewati semua ini. Terima kasih banyak karena telah menjadi orang tua yang hebat buat Ananda. Terkhusus buat abang (MHD Ikhlas Adi Pratama SH), abang (Badril Ilham S.Pi), dan adik (Rafli Nugraha) yang senantiasa mendukung, memotivasi, serta mendoakan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada Ayahanda Husin dan Ibunda Nurmala yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas, restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN SUSKA, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH. M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Muslim S.Ag, SH. M.Hum yang telah memeberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan ini.
6. Bapak Marzuki M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas Ilmu Hukum C 2015, Firdaus, Habibi, Hendrico, Dika, Emel, Hamka, Habibul, Bayu, dan seluruh teman-teman IH C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman “KKN Desa Kampung Sri Gemilang” yang memberi semangat dan dukungan penuh selama penulis mengerjakan skripsi yaitu Tio, Ridho, David, Disty, Hayati, Ame, Tiwi, Hilda, Lisma, Taridah.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis mulai dari awal masuk Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Maaf apabila penulis tidak dapat menyebutkan nama satu persatu, terima kasih semuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta tercatat sebagai ibadah disisinya. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, 23 September 2019

HIJRAH TUL AMAL
NIM. 11527100025

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	16
A. Sejarah Kabupaten Kampar.....	16
B. Profil Kecamatan Bangkinang	21
1. Sejarah Kecamatan Bangkinang	21
2. Kondisi Wilayah.....	27
3. Luas Wilayah	27
4. Keadaan Alam	27
5. Batas-Batas Wilayah	28
6. Sosial Budaya.....	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Pengertian Al-Qur'an.....	31
B. Pemerintah Daerah.....	33
C. Peraturan Daerah.....	39
D. Sosialisasi Peraturan Daerah	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 45

- A. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an 45
- B. Apa saja faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an 52

BAB V PENUTUP..... 59

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat) sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (rechtsidee) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.¹

Di era Otonomi Daerah yang memberlakukan asas desentralisasi, Pemerintah Pusat memberikan kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas , sistem, tujuan, dan landasan hukum.² Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk membuat Perda dan peraturan Kepala Daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), h. 538

² Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2016), h. 1

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah , setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam proses pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh DPRD bersama Kepala Daerah harus memperhatikan salah satu aspek yaitu aspek keterbukaan, bahwa setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi atau praktisi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pembentukan Perda itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematis, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas.

³ Ibid, h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasannya di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁴

Dalam aturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dalam pasal Pasal 253:

1. DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
2. Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.

⁴ Syaukani Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2009), h 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
4. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
5. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁵

Melalui penyebarluasan Perda yang telah disahkan kepada publik diharapkan bahwa masyarakat dalam lingkup nasional dan regional dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di wilayahnya, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi hukum dengan mengedepankan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum. Terlebih dengan masyarakat di daerah yang lebih sulit untuk mengakses informasi di bandingkan dengan masyarakat di wilayah kota-kota besar di Indonesia ataupun kota metropolitan, sehingga penyebarluasan melalui metode selain media elektronik dan melalui sosialisasikan Perda harus di maksimalkan oleh Pemerintah Daerah.

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 253.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam sebagai pedoman hidup kaum muslim tentunya tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan Allah SWT, tetapi juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah pendidikan.

Al-Qur'an adalah sumber ajaran Agama Islam yang utama, Al-Qur'an memegang peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan tingkah laku manusia atau pembentukan akhlak yang mulia. Artinya bahwa, seseorang akan melahirkan sebuah tata nilai yang luhur dan mulia jika mengikuti sumber dari Al-Qur'an. Tata nilai itu kemudian melembaga dalam suatu masyarakat dan pada gilirannya akan membentuk sebuah kebudayaan dan peradaban yang islami.⁶

Dalam rangka untuk meningkatkan akhlak/moral, serta meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Kampar, maka dipandang perlu bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati pandai membaca Al-Qur'an, yang dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar, sehingga dapat membentuk kepribadian dan dapat mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Maka Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an. Agar dikeluarkannya Perda tersebut untuk meningkatkan kualitas manusia atau

⁶ Adhi Susanto, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Baca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar". JOM FISIP Vol 4 No 1-Februari 2017, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan kebiasaan sehari-hari membaca Al-Qur'an. Adapun tujuan diadakan Perda ini adalah :

- a. Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
- b. Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman, dan bertaqwa.
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
- d. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Mushollah dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Shalat.⁷

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perda ini adalah:

- a. Sebagai acuan dari masyarakat Kabupaten Kampar untuk mencintai dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, khususnya bagi anak didik, pegawai, dan calon mempelai/pengantin, agar dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi aparaturnya pemerintah daerah, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam konteks ini juga menjadi wadah penyebar informasi mengenai kebijakan daerah di Kabupaten Kampar. Setidaknya dari kajian-kajian mengenai implementasi kebijakan daerah sering ditemui kegagalan implementasi yang disebabkan kurangnya sosialisasi (komunikasi kebijakan). Oleh sebab itu studi ini menjadi sangat strategis untuk mengetahui peranan Bagian Humas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan-kebijakan daerah di Kabupaten Kampar.

Hasil pengamatan dan informasi yang saya dapat belum ada kebijakan pemerintah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an. Namun kenyataannya, khususnya masyarakat Kecamatan Bangkinanng Kabupaten Kampar belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan bersama antara Pemerintah dan DPRD dalam studi yang berjudul:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an (Studi di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar).

B. Batasan Masalah

Karna luasnya Daerah Kabupaten Kampar mengenai perannya dalam mensosialisasikan suatu aturan di setiap Kecamatan, maka penulis akan membatasi dan menfokuskan masalah penelitian ini di Kecamatan Bangkinang yaitu untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Perda di Kecamatan Bangkinang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami Peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Perda.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian untuk penelitian lebih lanjut mengenai Peran Pemerintah Daerah.
2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam pembuatan Perda, khususnya dalam tahap penyerbaluasan Perda kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁸ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar dimana titik pengambilan data penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an pada: Kantor Bupati Kabupaten Kampar, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Kantor Camat Di kabupaten Kampar Yakni : Kecamatan Bangkinang.

3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.⁹ dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁰ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹¹ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹²

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30

¹⁰ *Ibid*, h. 31

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118

¹² *Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua DPRD	1	1	100%
2	Kepala Kementrian Agama Kabupaten Kampar.	1	1	100%
3	Kabag hukum dan HAM Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.	1	1	100%
5	Camat Bangkinang Kabupaten Kampar .	1	1	100%
6	Kepala Kelurahan/Desa Kecamatan Bangkinang.	9	5	50%
	Jumlah	13	9	

Sumber Data Lapangan 2019

5. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.¹³ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

6. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kampar.

¹⁴ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarannya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan lokasi penelitian yang terdiri dari, sejarah Kabupaten Kampar, profil Kecamatan Bangkinang, sejarah Kecamatan Bangkinang, kondisi wilayah, luas wilayah, keadaan alam, batas-batas wilayah, sosial budaya.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teori tentang tentang pandai membaca Al-Qur'an, teori tentang Pemerintah Daerah, asas-asas Pemerintah Daerah, teori tentang Perda.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an dan faktor-faktor

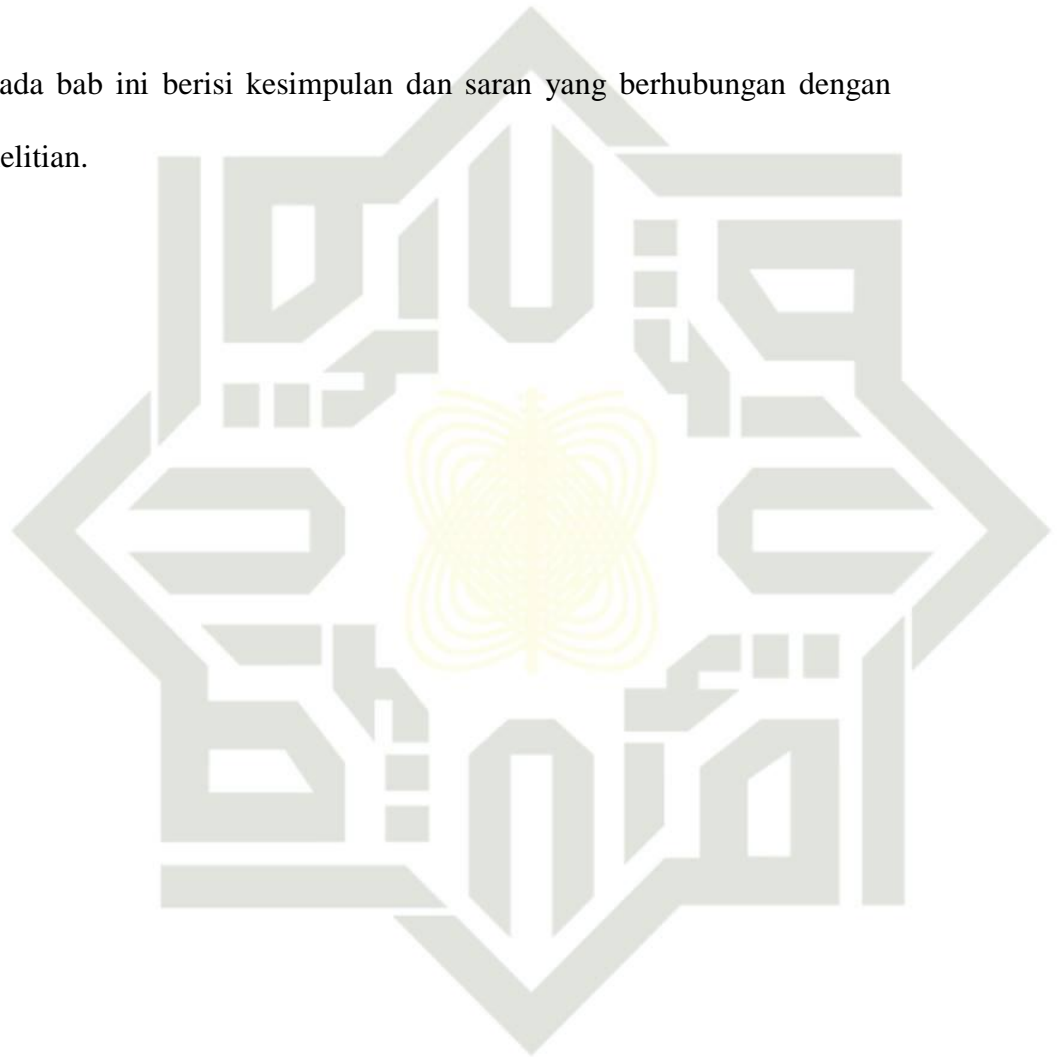
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 Februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 1999 dengan rujukan Peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 06 Februari 1950. Dan secara administratif Pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana Daerah ini dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa Pemerintahan sistem adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, Pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), Daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Adat hingga bahasa sehari-hari hampir mirip dengan Minangkabau dan demikian pula semacam seni budaya, alat musik tradisional (Calempong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Oguong) dan beberapa kebiasaan lainnya. Kampar sebagai Kabupaten tertua di Provinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km², dengan beberapa kali pemekaran wilayah, seperti lahirnya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, sementara jumlah penduduknya berkisar 750.000 jiwa/km² dengan batasan-batasan wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Lima Puluh Koto (Sumatera Barat).

Kampar memiliki catatan sejarah yang membuktikan asal-usul dan identitas diri masyarakatnya dengan adanya situs-situs Kerajaan seperti terdapat di Darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar Riau sampai saat ini masih menyisakan kejayaannya. Hal itu bisa terlihat dari masih berdirinya situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini. Istana Kerajaan Darussalam berdiri di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Tidak ada keterangan pasti tentang kapan raja Darussalam pertama berkuasa. Literatur sejarah Melayu pun tidak banyak menjelaskan asal-usul Kerajaan di pinggir Sungai Kampar ini. Hanya para tokoh adat di Gunung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sahilan memperkirakan Kerajaan Darussalam diperkirakan berdiri sekitar tahun 1901.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua Sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Sedangkan Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan Pemerintahan masih berdasarkan persekutuan Hukum Adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas yakni :

1. Desa Swapraja meliputi: Rokan, Kunto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan, yang merupakan suatu Raja-raja dibawah district loofd Pasir Pengaraian yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Daerah/wilayah yang masuk Residensi Riau.
2. Wilayah Bangkinang: membawahi Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk Residensi Sumatera Barat, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susunan masyarakat hukumnya sama dengan Daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak.

3. Desa Swapraja Senapelan/Pekanbaru meliputi: wilayah Kampar Kiri Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan, Singingi sampai Kenegerian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau).
4. Desa Swapraja Pelalawan meliputi: Bunut, Pangkalan Kuras, Serapung dan Kuala Kampar (Residensi Riau), Situasi genting antara Republik Indonesia dengan Belanda saat itu tidak memungkinkan untuk diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah pada bulan November 1948.

Berdasarkan pembagian tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokan wilayah Kabupaten Kampar. Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Bundar. Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan Pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya Ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor: 3/dc/stg/50 Tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Kampar Nomor: 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor: 01 Tanggal 5 Februari 1999 Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam lembaran Negara tahun 1999 Nomor Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati wilayah I dan Bupati Wilayah II.¹⁵

1. Sejarah Kecamatan Bangkinang

Berbicara tentang sejarah Kecamatan Bangkinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013, Kecamatan Bangkinang Seberang berubah menjadi nama Kecamatan Bangkinang sedangkan Kecamatan berubah menjadi Kecamatan Bangkinang Kota. Kecamatan ini tergolong kepada Kecamatan yang baru berdiri yang diresmikan pada tanggal 16 Desember 2006 yang pada saat itu bernama Kecamatan Bangkinang Seberang sedangkan Kecamatan Bangkinang Kota dahulunya bernama Kecamatan Bangkinang, pemecahan Kecamatan ini dahulunya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Koto Kampar Hulu.

Perubahan nama (Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang) atas tuntutan hati nurani serta kehendak masyarakat Kecamatan Bangkinang Seberang, supaya sebutan nama Kecamatan

¹⁵ Diakses dari <http://herwandisehputra.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-singkat-kampar.html> pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 11.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bangkinang Seberang di ganti dengan nama Bangkinang, hal ini selalu di sampaikan oleh warga masyarakat pada saat ada pertemuan-pertemuan, atau dalam suatu kegiatan formal maupun non formal, kemudian oleh Pemerintahan Kecamatan (yang ketika itu sebagai Camat adalah Drs. Jamilus) kehendak masyarakat tersebut disalurkan kepada Pemerintah.

Selanjutnya penyaluran aspirasi masyarakat tersebut disalurkan melalui beberapa tahapan antara lain:

TAHAPAN (1):

Camat Bangkinang mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, cerdik pandai, Kepala Desa, Lurah para Kepala Dinas cabang yang ada dalam wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang berikut UPIKA Kecamatan, sesuai dengan surat Undangan Nomor: 005/PEM 246 tanggal 02 Juli 2013 perihal: Undangan dengan agenda penyaluran aspirasi masyarakat tentang nama Kecamatan dari sebutan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang. Semua hasil keputusan rapat dengan berita acara, Camat Bangkinang Seberang melaporkan kepada Bupati Kampar dan untuk diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Kampar.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat memproses perolehan nama Kecamatan tersebut, dan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar memutuskan dan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang menjadi Kecamatan Bangkinang, sedangkan Kecamatan Bangkinang menjadi Kecamatan Bangkinang Kota.

TAHAPAN (2):

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan nama Kecamatan, dasar, tujuan dan manfaat perubahan nama Kecamatan Bangkinang Seberang sehingga dirubah menjadi sebutan nama Kecamatan Bangkinang adalah:

1. Atas kehendak masyarakat itu sendiri, bahwa untuk sebutan nama Kecamatan Bangkinang Seberang diganti dengan nama Kecamatan Bangkinang.
2. Secara Historis, yang disebut dengan Bangkinang adalah Negeri Bangkinang yang masa dulu sebutan nama Negeri itu disebut dengan sebutan Kampung, yaitu Kampung Godang, Kampung Deling (Desa Pulau Lawas), Kampung Uwai (Desa Muara Uwai), Pulau (Kelurahan Pulau), Binuang (Desa Binuang), Pasir Sialang, Tanjung (Kelurahan Pasir Sialang).
3. Karena penduduk asal Bangkinang adalah warga Bangkinang asli, (keturunan darah Bangkinang) yang hanya sebagian kecil saja penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendatang, kecuali Eks. Transmigrasi. Sedangkan Kecamatan Bangkinang Kota Mayoritas penduduk pendatang.

4. Sebutan nama Bangkinang supaya lebih menyentuh di hati masyarakat, sekaligus mengembalikan rasa kenegerian meresap kepada hati dan jiwa masyarakat itu sendiri.

DAFTAR RIWAYAT CAMAT BANGKINANG

NO	NAMA	JABATAN	SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN			TMT PELANTIKAN	S/D TANGGAL	NIP	KET
1	H. MUNIR S.Sos	CAMAT	821.2/BAKD- adm/2005/182	03-12- 2005	BUPATI	2005 (DILANTK)	2007	010123070	BANGKINANG SEBERANG
2	Drs. MUHAMMAD	CAMAT	821.2/BKD- ADM/2007/124	26-06- 2007	BUPATI	2007 (DILANTIK)	20012	010248213	BANGKINANG SEBERANG
3	FAKHRI, SH	CAMAT	821.2/BKD- ADM/111	10-04- 2014	BUPATI	2012 (DILANTIK)	27-12-2012	19631023 199603 1 002	BANGKINANG SEBERANG
4	Drs. JAMILUS	CAMAT	821.2/BKD- ADM/469	27-12- 2012	BUPATI	27-12-2012 (DILANTIK)	22-09-2014	19660109 199203 1 008	BANGKINANG SEBERANG S/D 18-07-2013
5	Drs. AMIRUDDIN	CAMAT	821.2/BKD- PKP/491	22-09- 2014	BUPATI	22-09-2014 (DILANTIK)	12-02-2015	19670601 199201 1001	BANGKINANG
6	Drs. AMIR LUDEFI, M.Si	Ptt CAMAT	821.2/BKD- PKP/37	12-02- 2015	BUPATI	(TIDAK DILANTIK)	10-04-2015	19650611 199401 1004	BANGKINANG
7	Drs. AMIR LUDEFI, M.Si	CAMAT	821.2/BKD- PKP/192	10-04- 2015	BUPATI	10-04-2015 (DILANTIK)	-	19650611 199401 1004	BANGKINANG

Sumber data: kantor Kecamatan Bangkinang

Kecamatan Bangkinang terdiri dari 7 (tujuh) Desa, 2 (dua) Kelurahan yaitu:

1. Desa Pulau Lawas
2. Desa Muara Uwai
3. Kelurahan Pasir Sialang
4. Kelurahan Pulau
5. Desa Suka Mulya (Eks Trans)
6. Desa Laboi Jaya (Eks Trans)
7. Desa Bukit Payung (Eks Trans)
8. Desa Bukit Sembilan (Eks Trans)
9. Desa Binuang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DATA KEPENDUDUKAN:

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH			JUMLAH KK	KET
		L	P	L+P		
1	PULAU LAWAS	1.568	1.497	3.065	789	
2	MUARA UWAI	1.954	1.975	3.929	1.067	
3	PASIR SIALANG	5.005	4891	9.896	2.542	
4	PULAU	1.521	1.457	2.978	764	
5	SUKA MULYA	1.553	1.572	3.125	863	
6	LABOI JAYA	1.580	1.534	3.114	862	
7	BUKIT PAYUNG	1.457	1.318	2.775	735	
8	BUKIT SEMBILAN	946	883	1.829	493	
9	BINUANG	1.002	936	1.938	467	
10	JUMLAH	16.586	16.063	32.649	8.564	

Sumber data: kantor Kecamatan Bangkinang

Pemekaran Kecamatan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan dan lapisan masyarakat Bangkinang, inilah yang benar-benar warga Bangkinang asli mayoritas penduduk asli keturunan darah Bangkinang, hanya sebagian kecil sebagai penduduk pendatang, kecuali untuk desa eks Transmigrasi, sedangkan warga Bangkinang Kota kebanyakan penduduk pendatang dari luar Bangkinang.

Visi dan misi Kecamatan Bangkinang:

Visi:

“terwujudnya profesionalisme, koordinatif pelaksanaan tugas dalam mendukung visi Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi:

Mendukung dan melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu:

- Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan professional.
- Mewujudkan mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas dan professional.
- Mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
- Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengelolaan yang maju.
- Memperkuat citra Kampar sebagai serambih mekkah Riau yang religious, beradat dan berbudaya.

Kepariwisataan:

DESA/KELURAHAN	JENIS OBJEK WSATA	JMLH KUNJUNGAN WISATAWAN		JUMLAH HOTEL	
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	BINTANG (1-5)	MELATI (1-5)
PULAU LAWAS MARA UWAI PSIALANG PULAU SUKA MULYA BUKIT PAYUNG BUKIT SEMBILAN BINUANG	1 Unit	12.000	-	-	-
JUMLAH					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kondisi Wilayah

Kecamatan Bangkinang terletak antara 00.3`` LU sampai 00.20`` LU dan 100.55.`` BT sampai 101.05.`` BT dan berada di 450.475 meter diatas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar dan beberapa Sungai kecil yang ikut mengairi wilayah Bangkinang yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan. Tanah yang subur menjadi sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi komoditi utama warga masyarakatnya.

3. Luas Wilayah

Terdapat 2 (dua) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa definitif dengan luas Kecamatan lebih kurang **253,50 KM.**

4. Keadaan Alam

Keadaan geografis alam Kecamatan Bangkinang adalah dataran rendah dan berbukit yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan dengan komoditi utama adalah sawit, karet dan padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Kecamatan Bangkinang adalah mempunyai lokasi galian golongan C yang dapat membantu perekonomian rakyat serta dapat mengurangi angka pengangguran, namun pada akhir-akhir ini keberadaan tambang galian golongan C sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bias mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat dari penambang liar.

Selanjutnya kondisi alam yang banyak sungai dan rawa juga memungkinkan masyarakat beternak seperti sapi, kerbau, dan lain-lain, tetapi karena semakin sempitnya areal tempat kerbau mencari makan akibat dari penambangan/galian golongan C sehingga seakan-akan kerbau dianggap sebagai hama yang merusak tanaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Batas-Batas Wilayah

Wilayah Kecamatan Bangkinang terletak di sebelah Utara Kota Bangkinang yang terbentang dari sebelah Selatan ke Utara dengan batas sempadan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Salo.

6. Sosial Budaya

Warga Kecamatan Bangkinang mayoritas memeluk Agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu (Matrilineal) kebudayaan masyarakat di bidang seni yang di lestarikan selain seni belah diri juga seni music tradisional lainnya seperti Calempong, Dzikir Gubano, Dzikir Rebana, Berzanji yang syairnya berisikan shalawat Nabi, nyanyian islami

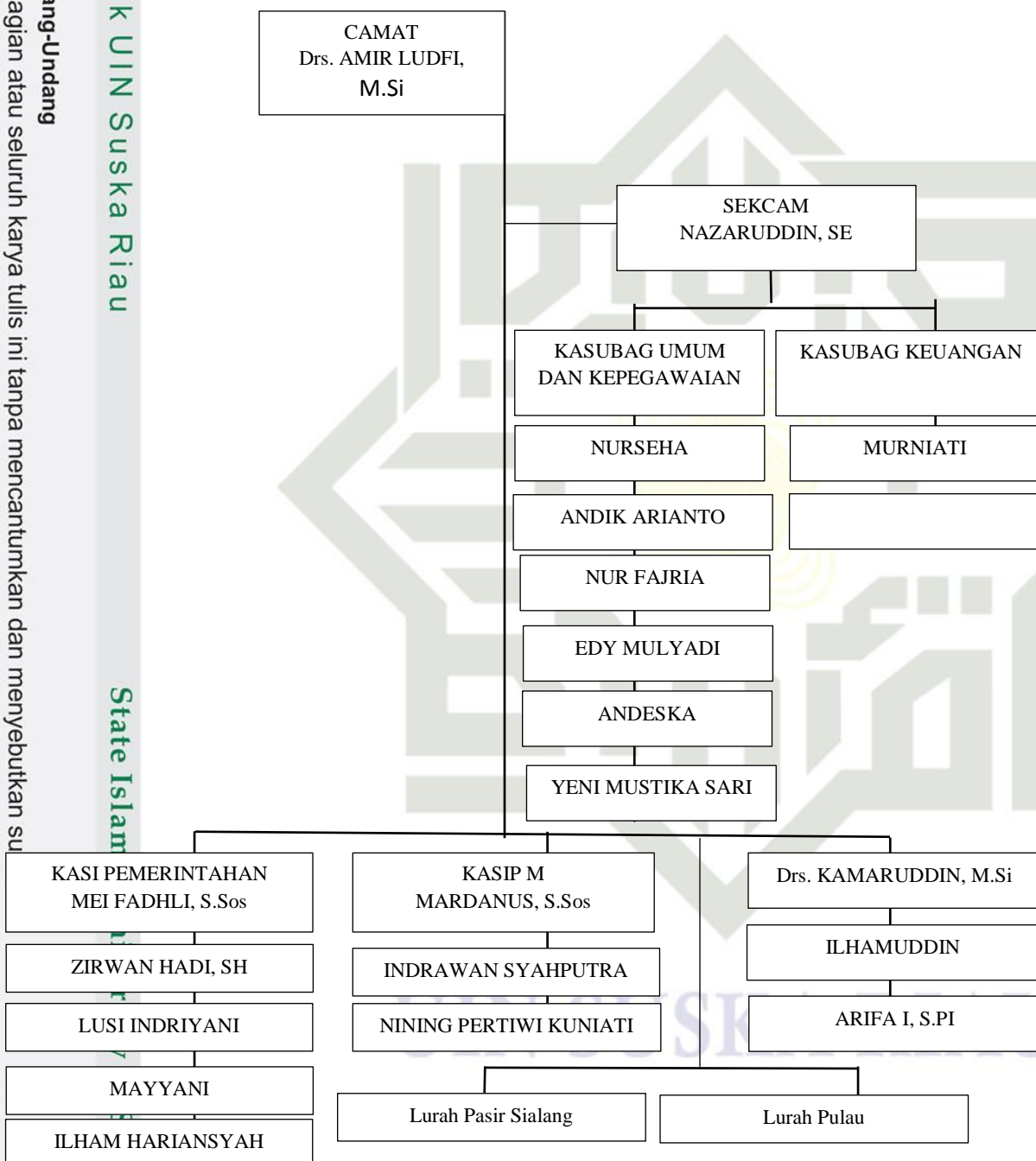
yang di miliki oleh hampir setiap kelompok majelis ta'lim di Kecamatan Bangkinang.

Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan sebutan UMA LONTIOK, pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti Ziarah Kubur pada hari raya ke 6 pada bulan Syawal tiap tahunnya yang sampai saat ini masih terpelihara dan di lestarikan, kemudian makan bajambau sehabis ziarah kubur dengan aneka lauk pauk, ikan sungai, dan makan dadio menjadi hidangan adat atau hidangan inti, pada acara makan bajambau dengan didampingi oleh makanan lainnya juga disajikan, seperti jambau kawa yang isinya makanan kue khas Bangkinang sebagai makanan penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN BANGKINANG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, kepada Nabi-nya Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman.

Al-Qur'an berarti bacaan, nama-nama lain dari kitab suci ini adalah Al-furqon (pembeda), Adz-zikir (peringatan) dan lain-lain, tetapi yang paling terkenal adalah Al-Qur'an. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Qur'an bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang Maha Agung dan "bacaan mulia" serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih dan rumit.¹⁶

Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab, sehingga Bahasa Arab menjadi Bahasa persatuan umat Islam sedunia, sehingga menimbulkan kesatuan yang dapat dilihat pada waktu shalat berjamaah dan ibadah haji,

¹⁶ Inu Kencana Syafii, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selain dari itu, Bahasa Arab tidak berubah. Al-Qur'an tidak lain adalah peringatan bagi seluruh umat manusia (bangsa-bangsa), Al-Qur'an dalam Bahasa aslinya (Arab) mempunyai daya Tarik dan keindahan yang deduktif, didapatkan dalam gayanya yang singkat tetapi cemerlang, bertenaga ekspresif, berenergi eksplosif dan bermakna kata demi kata.¹⁷

Kitab suci Al-Qur'an bukan hanya sekedar bacaan, namun mukjizat yang berisi firman-firman Allah SWT untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Dengan Al-Qur'an manusia bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.¹⁸

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi petunjuk, penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara hak dan bathil, benar dan salah, baik dan buruk serta terpuji dan tercela. Karenanya Al-Qur'an haruslah totalitas, keseluruhannya, bagian per bagian dan ayat per ayat yang ada di dalamnya. Keimanan terhadap Al-Qur'an mengharuskan untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap seluruh isi dan kandungan Al-Qur'an. Tidak boleh terjadi sikap bisa menerima tanpa reserve hukum-hukum ibadah atau akhlak, tetapi menolak hukum-hukum Al-Qur'an tentang kekuasaan, pemerintahan,

¹⁷ *Ibid*, h. 3

¹⁸ Adam Choll, *Dahsyatnya Al-Qur'an*, (Jakarta AMP Press, 2014), h.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, pidana, atau hubungan internasional. Sebab semuanya sama-sama berasal dari Al-Qur'an dan sama-sama merupakan wahyu Allah SWT.¹⁹

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia yang bisa mengantarkan mereka untuk meraih kesempurnaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maknanya, Al-Qur'an turun dalam rangka:

1. Memberi manusia petunjuk
2. Menjelaskan kepada mereka jalan petunjuk itu
3. Menerangkan jalan kebahagiaan dan kesuksesan mereka
4. Memandu mereka agar bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil dalam seluruh urusan kehidupan mereka.

Oleh karena itu maka Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk dibaca tetapi juga harus dipahami maknanya dan diamalkan di dalam kehidupan. Sebab, Al-Qur'an bukan sekedar bacaan dan kumpulan pengetahuan semata, tetapi petunjuk hidup bagi manusia. Al-Qur'an adalah pedoman hidup, sumber hukum untuk mengatur kehidupan.

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah secara sederhana berasal dari dua kata yaitu Pemerintah dan Daerah. Selanjutnya, Pemerintah jika ditinjau dari defenisi

¹⁹ *Ibid*, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata (etimologi), yaitu berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” yang menjadi Pemerintah, akan berarti badan atau organisasi yang mengurus. Jika kemudian ditambah dengan akhiran “an”, maka akan menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara atau perihal.²⁰

Menurut W.S Sayre, Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.²¹

Pembentukan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan terakhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

²⁰ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h. 8

²¹ *Ibid*, h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah, untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing untuk Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk Kota disebut Wakil Walikota.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Dr.H. Siswanto, S.H, M.H, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 54-55

2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah setidaknya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketiga macam asas tersebut. Namun, dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Macam-macam asas Pemerintahan Daerah:

a. Asas Desantralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga Daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan Pemerintahan yang demokratis. Suatu Pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan Pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk Daerah otonom.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintahan Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Amrah muslimin mengartikan dekonsentrasi ialah pelimpahan dari sebagian kewenangan Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Irawan Soejito mengartikan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Sedangkan Joeniarto mengatakan dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintah Pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.²³

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi.

Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, Kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

Daerah Otonom atau Daerah Swatantra adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja

²³ Ni"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), h 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan tugas Pemerintah umum di Daerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.²⁴

C. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. Perda terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah memiliki fungsi, yaitu:

- a. Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.
- b. Penampung khusus dan keberagaman daerah , serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka

²⁴ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 3-4

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- c. Alat Pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
- d. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Kemunculan persoalan di sekitar Perda bermasalah antara lain disebabkan oleh semangat berlebihan dari daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Ada sebagian Perda yang dipandang bermasalah karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang dipandang menghambat investasi ke daerah.

Kejadian ini mungkin berawal dari ketiadaan aturan operasional dari Pusat berupa Peraturan Pemerintahan yang mengatur kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga setiap daerah menafsirkan sendiri kewenangan yang ada pada dirinya. Apalagi Peraturan Pemerintah yang dimintakan oleh Undang-undang tersebut sebagai aturan pelaksanaannya sampai hari ini pun belum semuanya dikeluarkannya oleh Pemerintah. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dari keseluruhan Perda yang diterbitkan oleh sejumlah daerah ada beberapa Perda yang dipandang bermasalah.

Peraturan Daerah sendiri memuat materi tentang pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan yang ada di daerah dengan memperhatikan ciri-ciri khusus ataupun ciri khas kedaerahan. Peraturan Daerah juga memuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang penjabaran yang lebih mendetail mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, selain itu Perda juga memuat aturan tentang pelaksanaan asas tugas pembantuan di daerah.

Materi muatan Perda di bidang tugas pembantuan ditentukan sesuai dengan jenis tugas pembantuan yang menjadi urusan rumah tangga tugas pembantuan. Perda untuk melaksanakan otonomi meliputi seluruh urusan rumah tangga otonomi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dikatakan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁵

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 menegaskan bahwa Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengganti kan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditegaskan dalam Pasal 12 bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Desa/ yang

²⁵ Dr. H. Sudi Fahmi, SH, M.Hum, *Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran yang lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.²⁶

D. Sosialisasi Peraturan Daerah

Menurut Josef Mario Monteiro ada beberapa metode yang bisa di gunakan oleh Pemerintah Daerah guna menyebarluaskan Peraturan Daerah nya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penyebarluasan suatu Peraturan Daerah antara lain:

- a. Pengumuman melalui berita (RRI, TV Daerah) atau media cetak (Koran) oleh Kepala Biro Hukum Provinsi atau Kepala Bagian Kabupaten/Kota.
- b. Sosialisasi secara langsung oleh Bagian Hukum/Kepala Bagian Hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.
- c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka).
- d. Sosialisasi melalui sarana internet. Untuk ini Pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga tersebut.²⁷

²⁶ Dr. Abu Samah, MH, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 143

²⁷ Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam aturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dalam pasal Pasal 253:

6. DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
7. Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
8. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
9. Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
10. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 254:

1. Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Wali Kota.
3. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.²⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 253 dan Pasal

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an” adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar belum efektif dan banyak kendala dalam mensosialisasikannya yang masih harus diperbaiki.

1. Pelaksanaan sosialisasi oleh DPRD dengan melibatkan instansi Pemerintah terkait sebagai sosialitator dan masyarakat sebagai peserta sosialisasi. Diketahui bahwa pihak Kepala Daerah yakni bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekretariat Kabupaten Kampar dan DPRD yakni Bagian Hukum dan Perundang- undangan selama ini melaksanakan sosialisasi Perda masing-masing, dikarenakan koordinasi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut terkait Perda berjalan saat proses pembuatan sampai dengan proses penetapan suatu rancangan Perda menjadi sah sebagai Perda yang berlaku terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh elemen di Kabupaten Kampar. Peraturan Daerah tentang Pandai Membaca Al-Qur'an ini, pihak yang lebih bertanggung jawab dalam mensosialisasikan adalah Kementrian Agama dan instansi terkait seperti Kecamatan dan Kelurahan.

2. Salah satu faktornya adalah Pemerintah tidak terlalu mendukung dengan adanya Perda tentang Pandai Membaca Al-Qur'an ini, oleh sebab itu instansi terkait tidak mempunyai dana untuk mensosialisasikan ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar ini. Oleh karena itu, sampai saat sekarang ini Perda tentang Pandai Membaca Al-Qur'an tidak dijalankan sesuai Perda tersebut dengan semestinya.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah perlu menambah metode atau cara yang digunakan dalam mensosialisasikan Perda, hal ini bertujuan agar maksimalnya tujuan dari sosialisasi tersebut dapat tercapai sehingga pemahaman akan maksud dan tujuan dari Perda dapat sampai kepada masyarakat.
2. Sosialisasi Peraturan Daerah hendak nya di lakukan secara bersama-sama oleh pihak Pemerintah dan pihak DPRD dan juga pihak terkait dengan pertimbangan penghematan anggaran kegiatan sosialisasi yang tergolong cukup besar dan efisiensi waktu baik bagi pemateri atau pembicara maupun masyarakat sebagai peserta sosialisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adam Choll, *Dahsyatnya Al-Qur'an*, (Jakarta AMP Press, 2014).
- Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- Dr. H. Sudi Fahmi, SH, M.Hum, *Konsistensi Hukum antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, Total Media, 2009).
- Dr.H. Siswanto, S.H, M.H, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011).
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Ima Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013).
- Ima Kencana Syafiie, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000).
- Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016).
- Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011).
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Syaikhani Dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009).

PERATURAN: Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 253 dan Pasal 254

JURNAL :

Adli Susanto, *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pandai Baca Al-Quran di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar"*. JOM FISIP Vol 4 No 1-Februari 2017.

INTERNET :

Diakses dari <http://herwandisahputra.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-singkat-kampar.html> pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 11.35 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Petanyaan Pertanyaan Wawancara :

1. Apakah bapak/ibu mengetahui perda nomor 1 tahun 2013 tentang pandai membaca al-Qur'an?
2. Apakah perda ini sudah pernah disosilasikan sampai ke tingkat desa atau masyarakat umum?
3. Siapa saja yang terlibat dalam mensosialisasikan perda ini?
4. Bagaimana cara-cara/peran Pemerintah Kampar dalam mensosialisasikan perda ini sampai ke tingkat desa?
5. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kampar tentang perda ini?
6. Berapa lama proses dalam mensosialisasikan perda ini?
7. Dimana biasanya pihak pemerintah dalam mensosialisasikan perda ini?
8. Dengan adanya perda ini bagaimanakah pemerintah Kampar dalam menerapkan perda ini?
9. Apakah ada hambatan atau kendala pemerintah selama dalam mensosialisasikan perda ini?
10. Apa saja faktor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an.?

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN (STUDI DI KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR), ditulis oleh saudara :

Nama : HIJRAHTUL AMAL

NIM : 11527100025

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Maret 2019

Narasumber : Dr. H. MAGHFIRAH, M.A

Telah di perbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Maret 2019

Kepala Sub Bagian Akademik

Narasumber

Asfendi, S.Ag, M.Si

NIP. 19610918 196803 1 002

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4534/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : HIJRAHTUL AMAL
N I M : 11527100025
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 16 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Mei 2019

Dekan,



Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul, “**Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur’an (Studi Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**” yang ditulis oleh :

Nama : HIJRAH TUL AMAL
NIM : 11527100025
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019

Waktu : Jam, 13.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH.

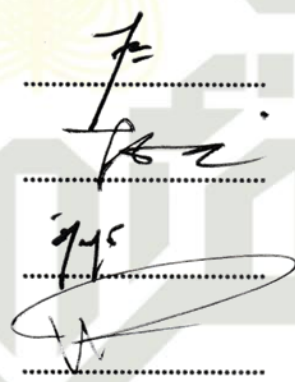
Pengji 1
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum.

Pengji 2
Dr. H. Abu Samah, MH.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HIJRATUL AMAL

NIM : 11527100025

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul : PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN (Studi
Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)

Pembimbing : MUSLIM, S.Ag., SH, M.Hum

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan.

Pekanbaru, 05 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahril, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau

Hak Cipta Peninggalan Undangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00 9/4940/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: HIJRAH TUL AMAL
NIM	: 11527100025
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: 1. Kantor Bupati Kampar 2. Kantor DPRD Kampar 3. Kantor Camat Bangkinang 4. Kantor Desa Di Kecamatan Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Peran pemerintah daerah kabupaten kampar dalam mensosialisasikan peraturan daerah
nomor 1 tahun 2013 tentang pandai membaca al-qur'an (studi di kecamatan bangkinang
kabupaten kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23031
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/PP.00.9/4940/2019 Tanggal 21 Mei 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

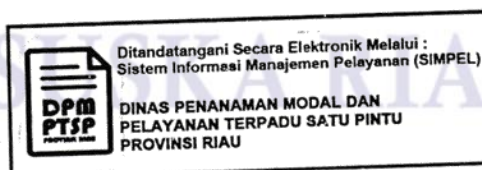
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HIJRAH TUL AMAL |
| 2. NIM / KTP | : | 11527100025 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QURAN (STUDI DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR BUPATI KAMPAR
2. KANTOR DPRD KAMPAR
3. KANTOR CAMAT BANGKINANG
4. KANTOR DESA DI KECAMATAN BANGKINANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/454

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN RISET/23031 tanggal 21 Mei 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **HIJRAH TUL AMAL**
2. NPM : **11527100025**
3. Universitas : **UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
4. Program Studi : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PEKANBARU**
7. Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QURAN (STUDI DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)**
8. Lokasi Penelitian :
 1. KANTOR BUPATI KAMPAR
 2. KANTOR DPRD KAMPAR
 3. KANTOR CAMAT BANGKINANG
 4. KANTOR DESA DI KECAMATAN BANGKINANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Juni 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL**
Kasi Kesatuan Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Bapak Bupati Kampar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kampar.
3. Sdr. Camat Bangkinang Kabupaten Kampar.
4. Kepala Desa Kecamatan Bangkinang.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
6. Yang Bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG

JL. DT. MUDO NO. 2 - MUARA UWAI

KODE POS 28451

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/2019/QS...

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/454 Tanggal 18 Juni 2019, Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi, bersama ini kami hadapkan kepada saudara, nama yang tersebut dibawah ini :

NAMA : HIJRAH TUL AMAL
NIM : 11527100025
Universitas : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S 1
Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PANDAI MEMBACA AL-QURAN (STUDI DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR)

Lokasi : 1. KANTOR BUPATI KAMPAR
2. KANTOR DPRD KAMPAR
3. KANTOR CAMAT BANGKINANG
4. BMKG KABUPATEN KAMPAR
5. KANTOR DESA DI KECAMATAN BANGKINANG

Untuk melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data riset/pras riset di Kelurahan Pasir Siaiang Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

DIKELUARKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 19 JUNI 2019

CAMAT BANGKINANG


Drs. AMIR LUDFI, M.Si
NIP.19650611 199401 1 004

Tembusan: disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Bangkinang
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Kepala Kantor Kecamatan Bangkinang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

HIJRAH TUL AMAL, Penulis lahir di Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 12 November 1996 merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Husin dan Ibu Nurmala. Pada tahun 2003, Penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 003 Pulau Bangkinang.

Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Bangkinang dan menamatkan pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Bangkinang Seberang dan menamatkan pendidikan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan pendidikan pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Pengadilan Negeri kelas II Bangkinang. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XVII di Desa Kampung Sri Gemilang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

Berkat Karunia dan Rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pandai Membaca Al-Qur'an (Studi Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)**", di bawah bimbingan langsung Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 Oktober 2019, penulis menyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.